

ANALISA PENGARUH GIRO DAN DEPOSITO SEBELUM DAN SETELAH DIKELUARKANNYA PAKTO 1988 DI INDONESIA

Oleh:
M. Umar Nuh
Suhel
Jatmiko

ABSTRACT

This research is intended to analyze the effect between demand deposits and time deposits against banking credit dispensation in Indonesia, on the period of pre-announced and post-announced the October Deregulation Package 1988.

The out come of this research is supposed to be the transformation that explain the demand deposits and time deposits effect on banking credit distribution even before or after The October Deregulation Package 1988. The data that is used in this research is secondary data which is from various sources, some of them are statistics center Burew, any lioterature, magazines, und books.

The analisist on this research is using the double linear regretion model. From the analisist result, Known R2 for the period of pre- announced The October Deregulation Package is equal to 0,972 according to the demand deposits effect against on banking credit and for the time deposits effect against banking credit is equal to 0,994. On the other hand, for the period of post-announced The October DeregulationPackage 1988, R2 is equal to 0,631. The statistic test (t-test) result for the time deposits effect against banking credit dispensation in the period of post announced The October Deregulation Package 1988 is significant. On the same case, in the period of post-announced The October Deregulation Package 198, the resul is not significant. It caused by proportion of demand deposits using against bankingcredit dispensation is on low level.

Keywords: Demand and Time Deposits, Bankring Credits

PENDAHULUAN

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa yaitu sebagai perantara keuangan antara debitur dan kreditur dana. Sesuai dengan undang-undang nomor 7 Tahun 1992 dan No 10 Tahun 1998, bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya

kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak . Bank dalam rangka menjalankan tugasnya yaitu menyalurkan kredit kepada masyarakat dapat juga menghimpun dana dari masyarakat yaitu dalam bentuk Rekening koran atau giro (demand Deposit), Deposito Berjangka, Tabungan, dan yang terakhir adalah Sertifikat Deposito. Kemudian setelah bank menghimpun dana dari masyarakat tersebut bank dapat menyalurkannya kembali kepada masyarakat karena dana yang diperoleh dari masyarakat tadi tidak langsung diambil seluruhnya oleh masyarakat. Pemanfaatan dari dana yang berada di bank tersebut dapat digunakan untuk memberikan kredit kepada masyarakat atau bank dapat juga menggunakannya untuk membeli surat-surat berharga.

Dari latar belakang di atas yang telah dikemukakan, maka dirumuskan permasalahan yaitu apakah Giro dan Deposito berpengaruh terhadap kredit yang disalurkan perbankan sebelum dan setelah PAKTO 1988.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh giro dan deposito terhadap kredit perbankan sebelum dan setelah PAKTO 1988.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Permintaan Keynes

Keynes membedakan 3 motif untuk apa orang menahan uang. Berdasarkan "*Psychological Law of Consumer Behaviour*" yaitu :

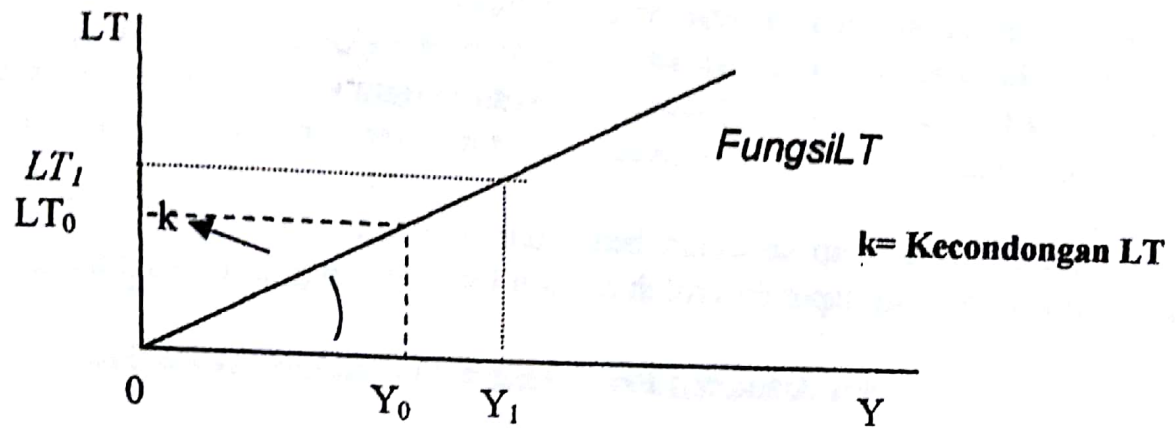
1. *Transaction motive* (motif transaksi) yang menimbulkan demand untuk transaksi.
Memegang uang untuk tujuan transaksi merupakan tujuan yang telah disadari. Didalam perekonomian yang sudah sangat modern dan tingkat spesialisasinya sangat tinggi uang adalah sangat diperlukan.
2. *Precautionary motive* (motif berjaga-jaga) yang menimbulkan demand untuk berjaga-jaga.
Disamping untuk transaksi uang diminta pula oleh masyarakat untuk menghadapi masalah-masalah yang timbul dimasa yang akan datang. Setiap orang tidak dapat menduga akan kejadian-kejadian yang mungkin berlaku dimasa yang akan datang. Adakalanya keadaan-keadaan dimasa yang akan datang lebih menguntungkan daripada yang diramalkan.
3. *Speculative motive* (motif spekulasi) yang menimbulkan demand untuk spekulasi.
Besarnya uang yang dipegang oleh masyarakat ditentukan pula untuk tujuan spekulasi. Masyarakat yang memegang uang untuk tujuan spekulasi selalu akan membuat pilihan diantara memegang uang atau menggunakan uang itu untuk surat berharga seperti surat pinjaman dan saham perusahaan

Permintaan uang untuk Transaksi dan Berjaga-jaga (LT)

Perlunya seseorang ataupun masyarakat (pemerintah) selalu menginginkan memegang uang kas untu tujuan-tujuan ini disebabkan karena penerimaan tidak selalu

selaras (sepadan) dengan pengeluaran. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan waktu antara penerimaan dan pengeluaran uang.
Fungsi permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga adalah sebagai berikut :

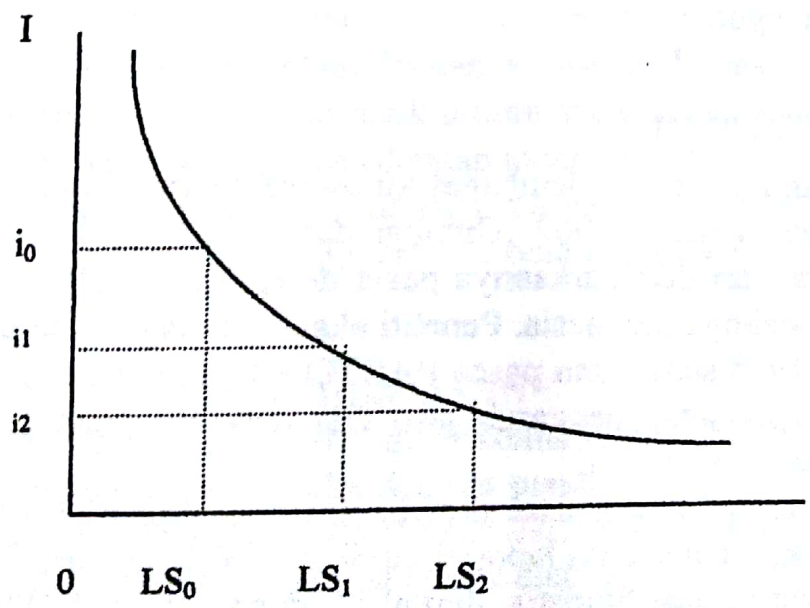
Gambar 1. Kurva permintaan Uang Untuk Transaksi Dan Berjaga-jaga



Permintaan uang untuk spekulasi (LL)

Spekulasi dikaitkan dengan ketidakpastian harapan (uncertainty expectation) dari tingkat bunga yang akan datang. Tujuan spekulasi pemegang uang kas adalah mencari untung atau menghindari kerugian dari perubahan nilai obligasi. Yang dimaksud dengan spekulasi disini adalah spekulasi dalam surat-surat berharga khususnya obligasi. Para spekulan membeli surat-surat berharga (obligasi) pada waktu obligasi murah. Dengan cara ini spekulan mendapat untung. Menurunnya harga obligasi mengakibatkan jumlah uang yang diminta masyarakat dengan motif spekulasi berkurang. Sebaliknya meningkatnya harga obligasi akan mengakibatkan jumlah uang yang dibutuhkan masyarakat dengan motif spekulasi meningkat.

Gambar 2. Kurva Permintaan Uang Untuk Spekulasi



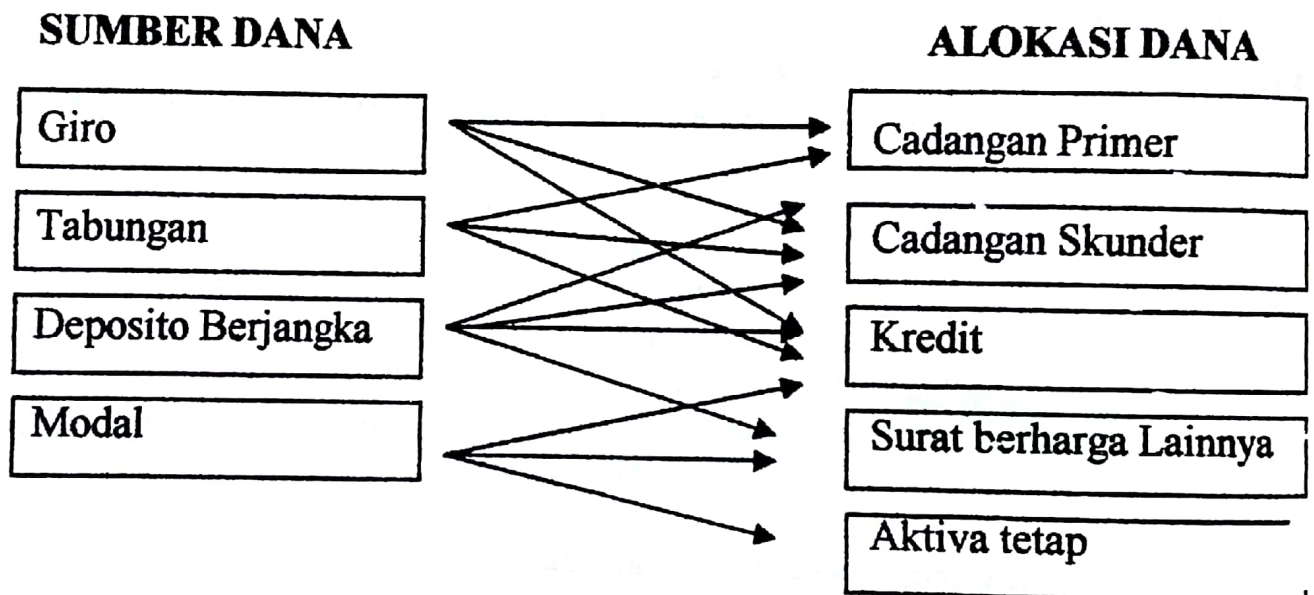
Pada tingkat bunga tinggi (i_0) permintaan uang untuk spekulasi sedikit (LS_0). Sedangkan pada tingkat bunga rendah (i_2) permintaan uang untuk spekulasi banyak LS_2 .

The Assets Allocation Approach.

Menurut pendekatan ini tingkat likuiditas yang diperlukan berbeda antara giro, deposito berjangka, tabungan, serta modal. Pendekatan ini berusaha untuk mengatasi kelemahan dengan cara memperhatikan bahwa jumlah likuiditas yang diperlukan oleh bank erat hubungannya dengan jenis sumber dana. Dana yang berasal dari giro sebagian besar harus dialokasikan untuk cadangan primer dan skunder dan hanya sebagian kecil saja untuk kredit. Sedangkan yang berasal dari tabungan dan deposito berjangka sebagian besar dialokasikan pada kredit atau pembelian surat berharga, sedangkan untuk cadangan sedikit saja.

Untuk aktiva tetap sebagian besar dananya dari bank sendiri. Dengan cara ini diharapkan keuntungan dapat diperoleh namun likuiditas dapat terpelihara.

Gambar 3. Skema Pendekatan The Assets Allocation



METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis membahas kurun waktu yang digunakan adalah dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2002. Dimulai dari tahun 1980 karena pada tahun tersebut merupakan awal dari dikeluarkannya paket deregulasi yang dimaksudkan untuk mengatasi krisis yang menimpa Indonesia. Peneliti akan membagi masa sebelum PAKTO 1988 yaitu tahun 1980-1988 sedangkan pasca PAKTO 88 yaitu tahun 1989-2002. Untuk analisis dititik beratkan terhadap pengaruh giro dan deposito yang ada di perbankan terhadap penyaluran kredit perbankan.

Data yang digunakan adalah data skunder Data ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari laporan-laporan berkala/tahunan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Biro Pusat Statistik, Jurnal Ekonomi, Buletin, Majalah, dan lain-

lain. Selain itu peneliti juga mempelajari literatur dan tulisan-tulisan ilmiah yang membahas masalah-masalah yang erat hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Data-data yang diperlukan pada penelitian ini antara lain adalah data giro, deposito, tabungan, dana perbankan, kredit yang disalurkan, Inflasi, LDR, Jumlah kantor bank, data jumlah bank.

Dalam Menganalisis masalah ini teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif yaitu dengan menganalisa data yang ada. Untuk menganalisis peranan dana perbankan terhadap penyaluran kredit perbankan digunakan analisis kuantitatif dengan persamaan regresi linier sederhana dengan rumus :

1. Untuk masa sebelum Pakto 1988 :

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 gr_1 + \beta_2 dp_1$$

dimana :

- Y_1 : Jumlah kredit yang disalurkan sebelum Pakto 1988
 gr_1 : Giro sebelum Pakto 1988
 dp_1 : Deposito sebelum Pakto 1988

2. Untuk masa setelah Pakto 1988 :

$$Y_2 = \alpha + \beta_1 gr_2 + \beta_2 dp_2$$

dimana :

- Y_2 : Jumlah kredit yang disalurkan Setelah Pakto 1988
 gr_2 : Giro Setelah Pakto 1988
 dp_2 : Deposito Setelah Pakto 1988

Agar pembahasan lebih terarah, dalam penulisan ini diperlukan batasan-batasan variabel, yaitu :

1. Kredit perbankan adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan dengan pemberian bunga. (Miliar)
2. Giro adalah simpanan pada bank umum yang setiap saat dapat diminta kembali untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro. (Miliar)
3. Deposito berjangka adalah simpanan masyarakat yang ada di bank untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1,3,6 atau 12 bulan. (Miliar)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan moneter sebelum dikeluarkannya Paket Deregulasi 1 Juni 1983 adalah secara langsung yang ditandai dengan pengaturan pagu kredit dan tingkat bunga oleh bank Indonesia, serta penyediaan kredit likuiditas. Dengan demikian berarti bank-bank umum hanyalah sebagai pelaksana dalam menyalurkan kredit yang dikeluarkan oleh bank Indonesia. Dengan besarnya kredit likuiditas yang dikeluarkan oleh bank Indonesia

menyebabkan bank-bank umum tidak melakukan inovasi karena bank umum tidak khawatir akan mengalami kesulitan likuiditas. Dengan sistem ini berarti kondisi perbankan Indonesia yang pada saat itu keadaannya telah diatur oleh Bank Indonesia, maka dengan operasi yang kurang baikpun bank-bank akan tetap mendapatkan keuntungan. Tidak hanya bank umum bank pemerintahpun demikian karena adanya jaminan dari Bank Indonesia, bank pemerintah tidak mungkin akan menutup usahanya sehingga masyarakat tentu saja akan lebih percaya apabila menyimpan di bank milik pemerintah.

Setelah dikeluarkannya paket deregulasi 1 Juni 1983 pemerintah mengeluarkan Paket 28 Oktober 1988. PAKTO 1988 ini merupakan perombakan menyeluruh dari sistem struktur keuangan dan perbankan di Indonesia, pemerintah juga mulai memperhatikan perkembangan pasar modal yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk lebih memperkuat sistem keuangan yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu saja pemerintah juga mengeluarkan beberapa paket deregulasi pada tahun-tahun berikutnya yaitu Paket 20 Desember 1988 yang berisikan peningkatan aktifitas pengembangan pasar modal, Paket 29 Januari 1990 dengan tujuan untuk mengurangi secara bertahap bantuan kredit likuiditas bank Indonesia dan kredit likuiditas hanya diberikan untuk pelestarian swasembada pangan, pengembangan koperasi serta peningkatan investasi, kemudian paket Februari 1991 untuk mengatur masalah operasional, pengawasan, dan penilaian bank, dan yang terakhir adalah paket deregulasi 29 Mei 1993 yaitu dengan memperlonggar ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum atau CAR dengan memperhitungkan seluruh laba tahun lalu sebagai komponen modal pada paket ini juga memperhatikan tentang kredit usaha kecil dengan menaikkan pagu kredit usaha kecil dari 200 menjadi 250 juta.

Tabel 1. Pertumbuhan Dana Perbankan dan Kredit Sebelum Dikeluarkannya Paket dan Deregulasi Oktober 1988

Tahun	Dana Perbankan	Pertumbuhan	Kredit Perbankan	Pertumbuhan	LDR
1980	6.410	-	7.880	-	122,9
1981	8.009	24,9	10.159	28,9	126,8
1982	8.868	10,7	13.022	28,1	146,8
1983	12.396	39,7	15.299	17,5	123,4
1984	15.498	25,0	18.813	22,9	121,4
1985	20.174	30,1	22.157	17,8	109,8
1986	23.510	16,5	26.402	19,1	112,3
1987	26.718	13,6	32.852	24,4	122,9
1988	37.490	40,3	44.001	33,9	117,4

Sumber : Biro Pusat Statistik

Pengurangan bantuan kredit likuiditas terus dilakukan oleh pemerintah pada PAKJAN 1990 pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa kredit likuiditas hanya diberikan untuk pelestarian swasembada pangan, koperasi dan untuk peningkatan

investasi. Hal ini berarti kredit likuiditas tidak lagi diberikan kepada bank-bank umum ataupun bank pemerintah seperti yang terjadi pada sebelum dikeluarkannya PAKJUN 1983. Penilaian tingkat kesehatan bank juga mulai diterapkan oleh pemerintah pada paket Februari 1991 dan lebih diperketat pada PAKMEI 1993. Diperketatnya terhadap tingkat kesehatan bank ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin menciptakan sistem perbankan yang sehat di Indonesia.

Dengan melihat terus meningkatnya dana perbankan ini berarti pada masa itu menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank sangat tinggi padahal pada tahun 1982 tingkat pertumbuhan dana perbankan hanya sebesar 10,7 % tetapi setelah dikeluarkannya paket deregulasi 1 juni 1983 dana perbankan pertumbuhannya meningkat menjadi 39,7 %. Hal tersebut menunjukkan dengan sistem baru yang dijalankan oleh pemerintah dengan mengubah kebijakan moneter secara langsung menjadi tidak langsung mengharuskan bank-bank yang ada terus bersaing untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk menarik dana dari masyarakat. Dengan sistem tersebut bank-bank juga bersaing dalam menentukan tingkat bunga yang ada dan kualitas layanan mereka sehingga mengakibatkan minat dan kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank menjadi semakin tinggi. Pertumbuhan dana perbankan dari tahun 1980 sampai dengan 1988 tentu saja akan mengakibatkan pertumbuhan yang positif pada penyaluran kredit perbankan. Kemudian setelah dikeluarkannya Paket Deregulasi Oktober 1988 yang merupakan awal dari liberalisasi dunia perbankan di Indonesia diharapkan pertumbuhan kredit perbankan akan semakin tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan kredit dan dana perbankan setelah PAKTO 1988 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Pertumbuhan Dana Perbankan dan Kredit Setelah Dikeluarkannya Paket Deregulasi Oktober 1988

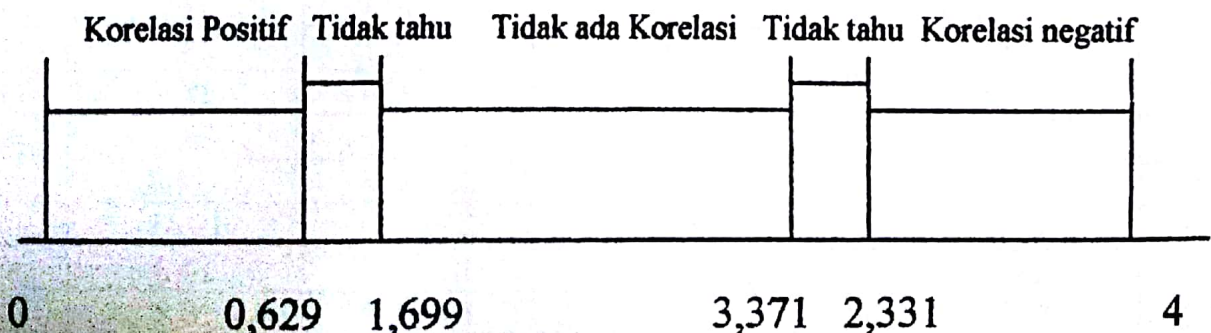
Tahun	Dana Perbankan	Pertumbuhan	Kredit Perbankan	Pertumbuhan	LDR
1989	54.376	44,9	63.606	44,5	116,9
1990	83.154	52,9	97.696	53,6	117,5
1991	84.440	15,5	105.260	7,7	124,6
1992	114.850	36,0	122.918	16,8	107,0
1993	142.679	24,2	150.271	22,3	105,3
1994	170.406	19,4	188.880	25,7	110,8
1995	214.764	26,0	234.611	24,2	109,3
1996	281.718	31,1	292.921	24,8	103,9
1997	357.613	26,9	378.134	29,0	105,7
1998	573.524	60,1	487.426	28,9	84,9
1999	625.618	9,3	225.133	-53,8	35,9
2000	720.339	15,2	269.000	19,48	37,3
2001	809.405	12,4	307.594	14,3	38,0
2002	845.015	4,4	365.410	18,8	43,2

Sumber : Biro Pusat Statistik

Paket 27 Oktober 1988 merupakan awal dari liberalisasi semua sektor keuangan. Berbeda dengan deregulasi 1983, Pakto 1988 merupakan perombakan menyeluruh atas sistem dan struktur keuangan dan perbankan di Indonesia, dengan meletakkan dasar-dasar dan landasan yang lebih kokoh menuju sistem keuangan dan perbankan Indonesia yang kuat, sehat dan dinamis dimasa mendatang. Untuk mencapainya tentu diperlukan proses penyesuaian dan perkembangan secara bertahap melalui waktu yang cukup. Salah satu isi dari PAKTO 1988 di bidang perbankan adalah kemudahan bagi pihak perbankan untuk membuka cabang-cabang didaerah, LKBB diizinkan untuk mendirikan kantor cabang, kemudahan untuk mendirikan bank swasta baru, pendirian usaha BPR atau bank pembangunan, dan lembaga keuangan dapat menerbitkan sertifikat deposito. Dengan dikeluarkannya kebijakan ini usaha pemerintah berhasil hal ini dapat kita lihat pada tahun 1989 pertumbuhan dana perbankan mencapai 44,9 % pertumbuhan juga terjadi pada kredit perbankan yaitu sebesar 44,5 %. Peningkatan kembali terjadi pada tahun 1990 yaitu mencapai 52,9 % pada dana perbankan dan 53,6 % pada kredit perbankan. Kemudian 1991 terjadi penurunan pertumbuhan kredit maupun penyaluran dana perbankan. Hal ini karena terjadi Inflasi sehingga pemerintah terpaksa mengeluarkan kebijakan uang ketat.

Untuk mengetahui seberapa besar sumbangan dana masyarakat terhadap kredit perbankan yang disalurkan dapat dilihat pada LDR (Loan To Deposit Ratio). Jika nilai LDR nya tinggi, maka selisih kredit dan dana pihak lebih besar, sedangkan apabila LDRnya kecil maka likuiditas bank tersebut akan terjamin. Sampai dengan tahun 1997 LDR berada diatas 110%, hal tersebut menunjukkan bahwa bank dari tahun-ketahun terus meringkatkan penyaluran kredit dengan dana yang dimilikinya, tetapi memasuki tahun 1998 LDR mulai berada di bawah 110 %. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa mulai dari tahun 1998 bank-bank untuk tetap menjaga likuiditasnya mengurangi penyaluran kredit kepada masyarakat agar tersedia dana yang likuid. Di sisi lain bank juga mengalami masalah kredit macet yang diakibatkan karena melemahnya dunia usaha. Beberapa masalah di atas mengakibatkan bank-bank pada saat krisis mengurangi penyaluran kredit mereka, Bank-bank akan berhati-hati dalam menyalurkan kredit agar masalah kredit macet ini tidak terulang kembali.

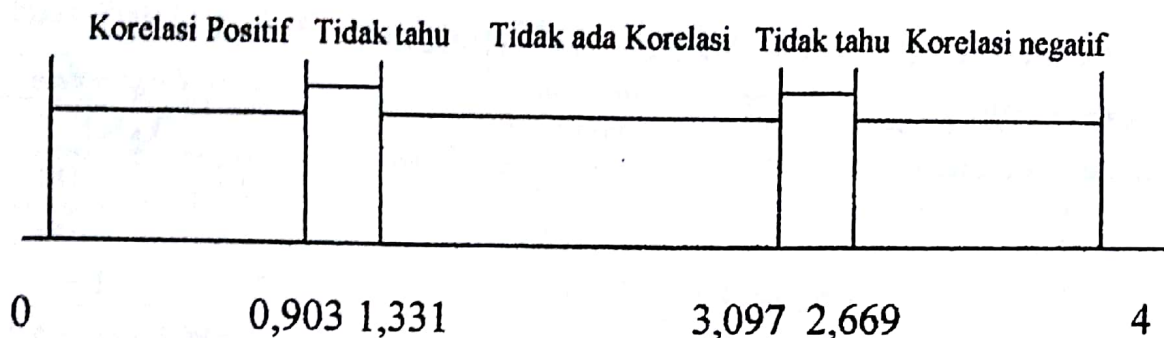
**Uji Otokorelasi
Sebelum PAKTO 1988**



Tabel Uji Durbin watson Sebelum PAKTO 1988

Karena uji Durbin Watson sebesar 1,829 untuk sebelum PAKTO 1988 maka terletak di $d_L < d < 4 - d_U$ maka jangan tolak H_0 maupun H_0^* , artinya tidak ada korelasi positif ataupun negatif.

Setelah PAKTO 1988



Tabel Uji Durbin Watson Pasca PAKTO 1988

Karena uji Durbin Watson sebesar 1,106 untuk Pasca PAKTO 1988 maka terletak di $d_L < d < d_U$ maka kita tidak dapat mengambil keputusan apa-apa.

Uji Heteroskedastisitas Sebelum PAKTO 1988

Tabel 3. Uji gejala Heteroskedastisitas sebelum PAKTO 1988

Variabel	Nilai t hitung	Nilai t tabel
Gr1	0,251	2,447
Dp1	-0,330	2,447

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil estimasi residual dengan variabel bebas ternyata didapat semua variabel bebas memiliki nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel, artinya hasil estimasi model persamaan regresi tersebut bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Setelah PAKTO 1988

Tabel 4. Uji gejala Heteroskedastisitas setelah PAKTO 1988

Variabel	Nilai t hitung	Nilai t tabel
Gr2	-0,614	2,201
Dp2	0,768	2,201

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil estimasi residual dengan variabel bebas ternyata didapat semua variabel bebas memiliki nilai t-hitung lebih kecil dari t-tabel, artinya hasil estimasi model persamaan regresi tersebut bebas dari gejala heteroskedastisitas.

**Uji Multikolinieritas
Sebelum PAKTO 1988**

Tabel 5. Collinierity Diagnostics^{a s} ebelum PAKTO 1988

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Indeks	Variance Proportion		
				(Constant)	GR1	DP1
1	1	2.793	1.000	.00	.00	.00
	2	.206	3.680	.01	.00	.03
	3	9.623-04	53.872	.99	1.00	.97

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS

Melihat hasil perhitungan di atas maka dapat dilihat bahwa pada model dengan kode 1 dan 2 condition indeksnya tidak melebihi 15 sehingga tidak terjadi multikolinicritas. Tetapi pada kode 3 melebihi 15 sehingga terjadi multikolinieritas. Karena terjadi multikolinieritas maka untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan metode Kountsoyiannis.

Metode Kountsoyiannis

Setelah digunakan metode Kountsoyiannis maka didapat :
Untuk pengaruh giro terhadap kredit perbankan, Uji Multikolinieritasnya adalah :

**Tabel 6. Collinierity Diagnostics^a Metode Kountsoyiannis
Sebelum PAKTO 1988**

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Indeks	Variance Proportion	
				(Constant)	GR1
1	1	1.970	1.000	.02	.02
	2	.030	8.066	.98	.98

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS Metode Kountsoyiannis

Melihat hasil perhitungan di atas maka dapat dilihat bahwa pada model dengan kode 1 dan 2 condition indeksnya tidak melebihi 15 sehingga tidak terjadi multikolinieritas pada model tersebut.

Untuk pengaruh Deposito terhadap kredit perbankan, Uji Multikolinieritasnya adalah :

Tabel 7. Collinierity Diagnostics^a Metode Kountsoyiannis Setelah PAKTO 1988

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Indeks	Variance Proportion	
				(Constant)	GR1
1	1	1.798	1.000	.10	.10
	2	.202	2.982	.90	.90

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS Metode Kountsoyiannis

Melihat hasil perhitungan di atas maka dapat dilihat bahwa pada model dengan kode 1 dan 2 condition indeksnya tidak melebihi 15 sehingga tidak terjadi multikolinieritas pada model tersebut.

Setelah PAKTO 1988

Tabel 8. Collinierity Diagnostics^a Setelah PAKTO 1988

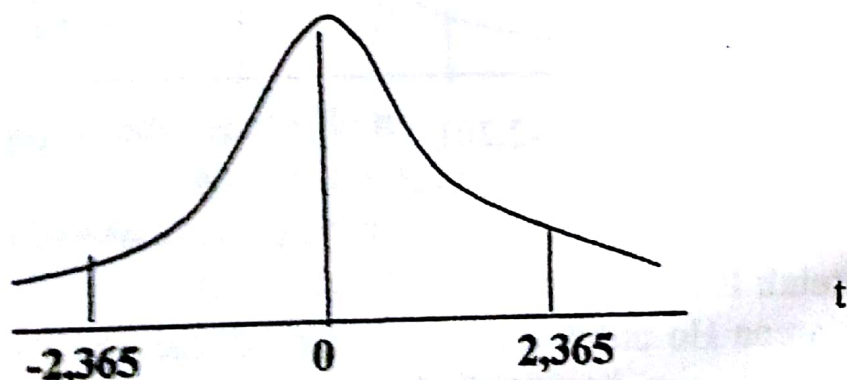
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Indeks	Variance Proportion		
				(Constant)	GR2	DP2
1	1	2.703	1.000	.04	.01	.01
	2	.275	3.138	.93	.03	.02
	3	2.230E-02	11.010	.03	.97	.98

Sumber : Hasil Perhitungan SPSS

Melihat hasil perhitungan di atas maka dapat dilihat bahwa pada model dengan kode 1, 2 dan 3 condition indeksnya tidak melebihi 15 sehingga tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Statistik

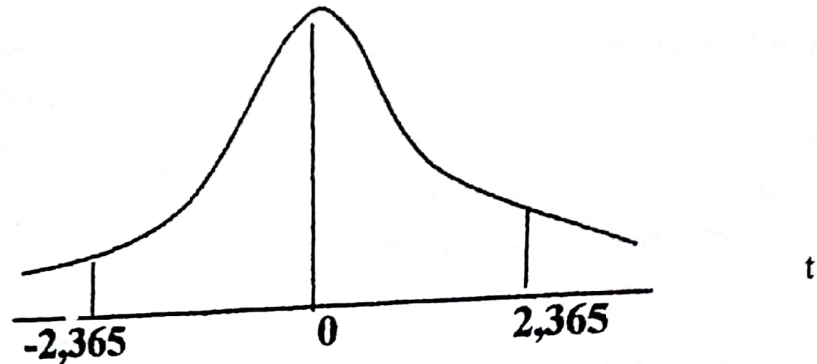
Sebelum PAKTO 1988



Uji-t Sebelum PAKTO 1988

Karena H_0 untuk giro berada di daerah tolak maka model tersebut signifikan.

Uji T untuk pengaruh deposito terhadap kredit perbankan :
Sehingga apabila digambarkan akan didapat sebagai berikut :

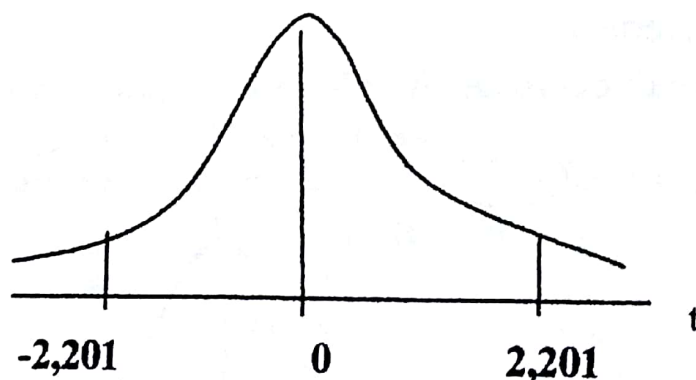


Uji-t Sebelum PAKTO 1988

Karena H_0 untuk giro berada di daerah tolak maka model tersebut signifikan.

Setelah PAKTO 1988

Untuk periode setelah PAKTO 1988 setelah dilakukan pengujian hubungan antara giro dan deposito terhadap kredit perbankan pasca PAKTO 1988 maka didapat nilai t uji seperti yang dijelaskan di bawah ini :

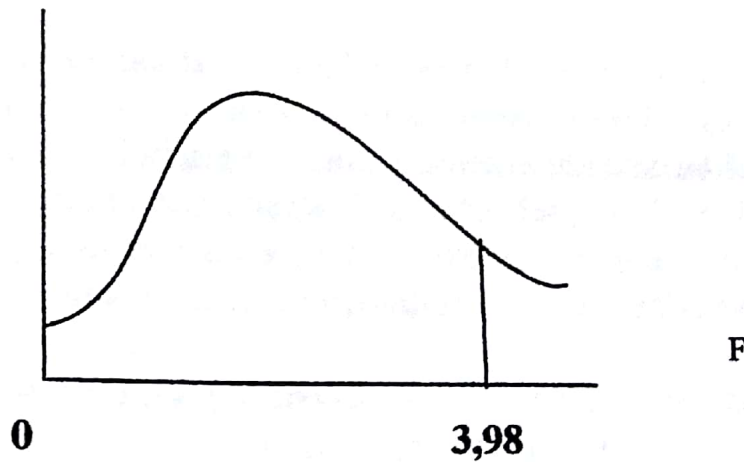


Uji-t Setelah PAKTO 1988

Karena H_0 untuk deposito berada di daerah tolak maka model signifikan. Dan H_0 untuk giro berada di daerah terima hal ini berarti bahwa model tidak signifikan.

Untuk Uji F

Untuk uji F didapat besarnya F-hitung yaitu 9,414 sedangkan besarnya F-tabel yaitu 3,98. Apabila digambarkan dapat kita lihat pada di bawah ini :



Uji-F Setelah PAKTO 1988

Setelah melakukan uji statistik dan ekonometrik Setelah dilakukan pengujian hubungan antara giro dan deposito terhadap kredit perbankan sebelum PAKTO 1988 maka didapat:

$$\begin{aligned} KPI &= 12i5,522 + 1,176Gr1 + 1,211Dp1 \\ \text{Standar Error} &= (8118,054) (1,729) (0,412) \\ T \text{ hitung} &= (0,150) (0,680) (2,937) \\ R^2 &= 0,988 \\ R &= 0,994 \\ f \text{ hitung} &= 254,984 \end{aligned}$$

Tetapi seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa karena model tersebut terkena multikolinieritas maka setelah menggunakan metode Kountsoyiannis model tersebut berubah menjadi :

1. Pengaruh giro terhadap kredit perbankan

$$Kp1 = \alpha + \beta gr1$$

2. Pengaruh deposito terhadap kredit perbankan

$$Kp1 = \alpha + \beta dp1$$

Dari perhitungan regresi didapat :

1. Pengaruh giro terhadap kredit perbankan sebelum PAKTO 1988

$$KPI = -21898.462 + 6,187gr1$$

$$\text{Standar Error} = (2862.979) (0.399)$$

$$\begin{aligned}T \text{ hitung} &= (-7.694) (15.514) \\R^2 &= 0,972 \\R &= 0,986 \\f \text{ hitung} &= 240.686\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas maka didapat bahwa setiap kenaikan 1 miliar giro akan menaikkan kredit perbankan sebesar 6,187 miliar rupiah. Kemudian R^2 sebesar 0,98 berarti determinasi antara variabel independen terhadap dependen yaitu sebesar 98%. R sebesar 0,97 berarti hubungan antara variabel independen terhadap dependen yaitu sebesar 97 %. Untuk mengetahui pengaruh deposito terhadap kredit dapat dilihat pada pengujian dibawah ini.

2. Pengaruh Deposito terhadap kredit perbankan sebelum PAKTO 1988

$$\begin{aligned}KPI &= 6708.866 + 1,488dpl \\Standar Error &= (769.418) (0.063) \\T \text{ hitung} &= (8.719) (23.567) \\R^2 &= 0,988 \\R &= 0,994 \\f \text{ hitung} &= 555.380\end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas maka didapat bahwa setiap kenaikan 1 miliar giro akan menaikkan kredit perbankan sebesar 1,488 miliar rupiah. Kemudian R^2 sebesar 0,98 berarti determinasi antara variabel independen terhadap dependen yaitu sebesar 98%. R sebesar 0,99 berarti hubungan antara variabel independen terhadap dependen yaitu sebesar 99 %.

Sama halnya dengan giro, untuk pengaruh deposito terhadap kredit perbankan pengaruhnya juga positif. Dari pengujian dapat diketahui bahwa kenaikan deposito sebesar 1 miliar akan menaikkan kredit yang disalurkan sebesar 1,488 miliar. Koefisien korelasi yaitu sebesar 99 %, berarti hubungan deposito terhadap giro juga besar yaitu sebesar 99 %. Kemudian koefisien determinasi yaitu sebesar 98 %, hal ini berarti deposito mempengaruhi besarnya kredit perbankan sebesar 98%.

Dari uji statistik secara keseluruhan untuk masa sebelum PAKTO 1988 didapat bahwa baik giro maupun deposito sesuai dengan hipotesis dimana peningkatan giro maupun deposito akan mengakibatkan peningkatan pula pada kredit perbankan.

Setelah dilakukan pengujian hubungan antara giro dan deposito terhadap kredit perbankan setelah PAKTO 1988 maka didapat:

$$\begin{aligned} KP2 &= 114538,6 - 1,141Gr2 + 1,005Dp2 \\ \text{Standar Error} &= (35988,08) (0,997) (0,404) \\ T \text{ hitung} &= (3,183) (-1,145) (2,489) \\ R^2 &= 0,631 \\ R &= 0,794 \\ f \text{ hitung} &= 9,414 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas maka didapat bahwa setiap kenaikan 1 miliar deposito maka akan meningkatkan kredit sebesar 1,005 miliar rupiah dan setiap kenaikan 1 miliar giro akan mengurangi kredit perbankan sebesar 1,141 miliar rupiah. Kemudian koefisien determaniasi (R^2) yaitu sebesar 0,63 berarti giro dan deposito mempengaruhi besarnya kredit yang disalurkan sebesar 63%. Koefisien korelasi @ yaitu sebesar 0,79 berarti hubungan antara giro dan deposito terhadap kredit yang disalurkan sebesar 79 %. Untuk masa setelah PAKTO 1988 setelah dilakukan perhitungan regresi ternyata tidaklah sesuai dengan hipotesis.

Bank-bank yang pada awal krisis sisi pasivanya didominasi oleh pinjaman valuta asing sementara sisi aktiva lebih banyak mengandung portofolio rupiah adalah jajaran perbankan yang paling parah. Apalagi apabila pada saat yang sama angka LDR (Loan to Deposit Ratio)-nya telah berada di atas 110%. Dapat dipastikan bank-bank yang demikian itulah yang menghadapi masalah likuiditas. Di sisi likuiditas bank-bank tersebut membutuhkan dana perbankan yang tinggi sebagai akibat dari terdepresinya nilai tukar rupiah. (H Masyhud Ali, 2002 ; 8). Hal tersebutlah yang menyebabkan bank-bank pada saat krisis menyalurkan kredit yang sedikit. Karena di samping menghadapi masalah likuiditasnya sendiri mereka juga dihadapkan oleh problem kredit macet sebagai akibat melemahnya dunia usaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Untuk masa sebelum dikeluarkannya PAKTO 1988 pengaruh giro dan deposito adalah sesuai dengan teori sedangkan setelah dikeluarkannya PAKTO 1988 pengaruh giro dan deposito tidak sesuai dengan teori karena pada tahun 1997 akibat adanya krisis yang menimpa Indonesia sehingga mengakibatkan bank-bank banyak yang terkena likuidasi sehingga mereka tidak menyalurkan kredit untuk tetap menjaga likuiditas mereka. Melihat hal tersebut di atas maka pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk menjaga dana masyarakat yang ada di Bank.

DAFTAR RUJUKAN

- Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1996.
- Sukirno Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997
- Kartasasmita, Ginandjar, dkk, *Upaya Memperkuat Rupiah*, Gramedia, Jakarta, 1998
- Boediono, *Ekonomi Moneter*, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 1985.
- Santoso, Singgih, *SPSS Versi 10*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Habibun, Ismail, *Paket 27 Oktober 1988 Tinjauan dari segi Peranan Kebijakan Moneter, Deregulasi dan Debirokratisasi Dalam pembangunan Ekonomi Indonesia*, Palembang, 1988.
- Roswita, *Peranan Kredit Perbankan dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Deregulasi di Indonesia*, Palembang, 1992.
- , *Ekonomi Moneter Teori, Masalah dan kebijaksanaan*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2000.
- , *Analisis Dampak PAKTO 1988 Terhadap Aktivitas Perbankan dan Perekonomian di Indonesia*, Palembang, 1992.
- Ali Masyhud, *Restrukturisasi Perbankan dan Dunia Usaha*, PT Elek Media Komputindo, Jakarta, 2002.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Arief, Sritua, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Penerbit UI-PRESS, 1993.
- Nachrowi, Djatal Nachrowi, *Penggunaan Tehnik Ekonometrik*, FT RajaGrafindo